

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin, J. (2020). *Sistem e-Katalog dan Implementasinya dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Hadi Pratomo. (2014). *Manajemen Kebijakan dan Pelaksanaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hadi, S. (2018). *Reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gava Media
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik (Vol.71)*. Surabaya: Unesa University Press.
- Prabowo, M. (2020). *Kebijakan dan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog*. Makassar: Penerbit Cendekia.
- Purnomo, W. (2021). *E-Katalog dan Transformasi Digital dalam Pengadaan Barang/Jasa*. Surabaya: Penerbit Unesa.
- Siahaya, Willem. (2012). *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.
- Sugianto, S., & Nurul Huda. (2021). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2019). *Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana..

- Suryana, (2010). *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sutoro Eko. (2009). *Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Komparatif*, Yogyakarta : Center of Akademik Publishing Service.
- Yuliana, R., & Rizki, A. (2022). *Strategi Implementasi e-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Kasus dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.

Regulasi:

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
- Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah.
- Intruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog Lokal dan Toko Daring di Kabupaten Semarang.
- Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 027/00500/2024 tentang Optimalisasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan serta Pelaksanaan E Purchasing TA 2024.

Jurnal :

Abdullah, R., dkk. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) di Provinsi. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. Vol. 2, No. 1.

BNNAdmin, (2022). Mengenal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Link : <https://kalbar.bnn.go.id/mengenal-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/> Diakses pada 30 September 2023.

Chairunisa, (2022). Perbandingannya dengan E-Katalog. *DailySocial*. Link : <https://dailysocial.id/post/katalog-pengertian-manfaat-dan-perbandingannya-dengan-e-katalog> Diakses pada 30 September 2023.

Cinta Ayu Puspa Dewi, Rida Perwitasari. (2022), Implementasi Sistem E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Jombang. *Journal of Economic, Bussines, and Accounting (COSTING)*.

David Spacek, Zuzan. (2023). Issues of E-Government Services Quality in the Digital-by-default era – the Case of the National E-Procurement Platform in Czechia. *Spackova Journal of Public Procurement Vol. 23 No. 1*.

Diani, F., dkk. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKN di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2.

Febria, Riski. (2018). Penerapan Layanan E-Government dalam Perwujudan Good Governance di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vo. 7, No. 2.

Fitri, Andi. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government dalam Menghadpi Pandemi Covid-19 di Indonesia. Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Fuat, M. A., & Salomo, R. V. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2021 yang Berkaitan dengan Pemberdayaan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Koperasi dan UMKM. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 8(2), 281-296.

Hamkah, Hadi Purwanto. (2018). Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pememrintah. *Jurnal Simerik*

Hendrawan, N., dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupeten Seluma. *Jurnal Rahwana Riset Humaniora dan Administrasi Negara*. Vol.1, No. 1.

- Nurmandi, Ahmad. (2018). Making e-procurement work in a decentralized procurement system A comparison of three Indonesian cities. *International Journal of Public Sector Management Vol. 28 No. 3*.
- Priskutiawan, A., Priyanto. (2023). Analisis Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui E-Katalog Lokal untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya. *SMIA*. Vol. 1, No. 2.
- Ramadannisa, C. A. (2023). Implementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jember untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 6(1), 109-128.
- Ramadannisa, Cantika. (2022). Implementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jember untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Academia Praja*. Vol. 6, No. 1.
- Setiawan, I., dkk. (2024). Implementasi Kebijakan tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran. *Indonesia Journal Of Education And Humanity*. Vol. 4, No. 2.
- Siahallan, R., dkk. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JMAP)*. Vol. 1, No.1.
- Situmorang, M., dkk. (2025). Efektivitas dan Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*. Vol.3, No.1.
- Sulaiman, A., Russell, L. (2020). An Investigation into Sustainable e-Government in Saudi Arabia. *The Electronic Journal of e-Government*, Vol. 18, No. 1.
- Widiyanti, N. M., Putu, I. A., (2023). Implementasi Kebijakan E-Katalog Lokal dalam Pengadaan Barang Jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng. Link : <https://easychair.org/publications/preprint/33SW> Diakses pada tanggal 28 Mei 2024.
- Widiyanti, N., Widyani, I. (2023). Implementasi Kebijakan E-Katalog Lokal dalam Pengadaan Barang/Jasa Terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng. *Easy Chair Preprint*. No. 10731.

Website :

Website resmi LKPP, Link : <http://www.lkpp.go.id/> Diakses Pada Tanggal 12 April 2024.

Website Resmi E-Catalogue, Link : <https://e-katalog.lkpp.go.id/> Diakses Pada Tanggal 12 April 2024.

Website LPSE Kabupaten Semarang, Link : <https://lpse.semarangkab.go.id/eproc4> Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2025.

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Semarang, Link : <https://main.semarangkab.go.id/> Diakses Pada tanggal 12 April 2024.